

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) 2019



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA CIMAHI**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi merupakan laporan pelaksanaan tugas (*progress report*) pada kegiatan Tahun Anggaran 2019. Penyusunan laporan ini dilakukan dengan acuan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022, yang diikuti dengan Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Pengukuran Kinerja Kegiatan termasuk Efisiensi dan Efektivitas Kegiatan Tahun 2019.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini disusun dan dilaporkan sebagaimana diamanatkan dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara, Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKIP ini berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi dalam rangka melaksanakan Visi dan Misi serta Perencanaan Strategis Kota Cimahi yang telah ditetapkan melalui Perda Nomor 9 tahun 2003.

Demikian laporan ini kami sampaikan sebagai bahan evaluasi kegiatan pada tahun-tahun mendatang.

Cimahi, Januari 2020

A. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KOTA CIMAHI, 



Ir. MEITY MUSTIKA

Pembina Utama Muda

NIP. 19630521 199303 2 006

Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi Tahun 2019 menyajikan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Selama 1 (satu) tahun. Target Kinerja Tahun 2019 yang ingin dicapai terdiri dari 3 (tiga) Sasaran Strategis. Untuk mengetahui tingkat perubahan naik atau turunnya kinerja yang telah dilaksanakan dapat dilakukan dengan cara mengukur dan membandingkan pencapaian kinerja Tahun 2019 dengan target Renstra Tahun 2018. Selanjutnya digunakan sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya.

Target Kinerja tahun 2019 sebagian besar dapat tercapai. Adapun permasalahan yang menghambat tercapainya target kinerja, dapat diatasi dengan melakukan upaya-upaya solusi yang telah dilaksanakan.

Hasil capaian target kinerja memberi gambaran keberhasilan atau kegagalan Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi. Persentase capaian kinerja yang diukur dari Sasaran Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kota Cimahi tahun 2019 dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Persentase Rata – rata Capaian Sasaran Kinerja
Tahun 2019

No.	Sasaran	Persentase Rata – rata Capaian
1.	Meningkatnya kemandapan Jalan Kota	93,50%
2.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas gedung pemerintahan	1,02 %
3.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap rencana rinci tata ruang	60 %

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	iii
 Bab I	 PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	1
1.3. Isu Strategis	1
1.4. Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4
1.5. Jumlah Pegawai/ASN Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5
Bab II	PERENCANAAN KINERJA
2.1. IKU Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7
2.2. Perjanjian Kinerja	7
2.3. Program Kegiatan dan Anggaran Yang Mendukung Perkin	9
Bab III	PENGUKURAN KINERJA
A. Capaian Kinerja Anggaran	
3.1. Capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10
3.2. Realisasi Capaian Kinerja Dengan Target Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018 & 2019	12
3.3. Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019 Dengan Target Jangka Menengah (Renstra)	12
3.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan	13
3.5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya	14
3.6. Analisis Program Atau Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	16
B. Realisasi Anggaran	17
C. Cross Cutting Program	18
Bab IV	PENUTUP
19	
 Lampiran-lampiran :	
1. PK Eselon II	
2. RKT	
3. Tabel Pengukuran Kinerja	
4. SK Tim LKIP	
5. Money Rencana Aksi	

BAB I

PENDAHULUAN

B A B I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Strategi pembangunan Kota Cimahi adalah menumbuhkembangkan pembangunan diberbagai aspek kehidupan masyarakat dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, sehingga pembangunan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat bersama-sama dengan Pemerintah.

Pemerintah sebagai fasilitator pembangunan, memberikan ruang dan arah. Kebijakan ini perlu agar dapat menciptakan sistem pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien. Masyarakat tidak hanya dianggap sebagai objek pembangunan, namun dilibatkan dan ditingkatkan peran sertanya dalam proses pembangunan agar terwujud suatu tatanan pemerintahan yang mantap yang memenuhi dinamika dan kebutuhan masyarakat.

Program pembangunan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang sebagai pelaku pembangunan dilaksanakan berdasarkan skala prioritas pembangunan yang mengacu pada hasil MUSRENBANG dengan harapan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan tersebut dapat mengurangi permasalahan-permasalahan kota serta semaksimal mungkin dapat menampung dan menjalankan aspirasi masyarakat.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi yaitu :

1. Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan tata cara review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Surat Sekretaris Daerah Kota Cimahi No. 1060/083/Org. Tanggal 8 Januari 2020 Perihal Penyampalan dokumen SAKIP;
4. Surat Sekretaris Daerah Kota Cimahi No. 1060/082/Org. Tanggal 8 Januari 2020 Perihal Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

1.3. Isu Strategis

Isu strategis dapat berasal dari permasalahan pembangunan yang dianggap paling prioritas untuk diselesaikan baik isu nasional maupun regional. Sesuai isu-isu strategis yang telah dihasilkan dalam tahap perumusan dituangkan dalam penyajian. Dalam penyajian isu

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun Anggaran 2017

1

strategis hal terpenting yang diperhatikan adalah isu tersebut dijabarkan apa manfaat/pengaruh dimasa datang terhadap daerah tersebut.

Isu strategis berdasarkan dari permasalahan pembangunan yang dianggap paling prioritas untuk segera diselesaikan. Adapun isu strategis ke PU-an yang terdapat di Kota Cimahi adalah :

a. Masih tingginya tingkat kemacetan lalu lintas

Permasalahan utama di bidang transportasi yang masih dihadapi di Kota Cimahi adalah persoalan rendahnya *Level of Service (LoS)*. Minimnya sarana dan prasarana transportasi pengurai kemacetan seringkali menyebabkan arus lalu lintas terhambat.

Jalan dengan status jalan kota di Kota Cimahi merupakan peningkatan status jalan dari jalan kecamatan, sehingga kapasitas yang ada sebenarnya belum dapat menampung jumlah kendaraan melintas yang setiap tahun bertambah. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas jalan di Kota Cimahi masih rendah.

Selain permasalahan kapasitas jalan, Kota Cimahi juga belum memiliki jalan lingkar selatan sebagai akses alternatif bagi kendaraan lintas kota yang melintasi bagian selatan Kota Cimahi. Hal itu pula yang menyebabkan, kendaraan antar kota yang melewati dalam Kota Cimahi menambah padatnya lalu lintas dalam kota. Selain karena belum adanya jalan lingkar selatan diketahui juga bahwa masih rendahnya ketersediaan jalan alternatif sebagai pengurai kemacetan dari timur ke barat (Padalarang ke Bandung). Adanya perlintasan sebidang dengan kereta api di daerah Gatot Subroto dan Sriwijaya pun menambah hambatan arus lalu lintas kota.

Langkah strategis mengantisipasi hal tersebut saat ini Dinas PUPR telah melaksanakan kegiatan DED dan pertininan untuk pembangunan *Underpass Dustira-Sriwijaya* untuk mengurangi hambatan-hambatan arus lalu lintas yang saat ini masih terjadi. Untuk mengurangi kemacetan tersebut diatas diperlukan penambahan jumlah jembatan.

Intervensi yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan persoalan transportasi di Kota Cimahi adalah dengan menyediakan sarana dan prasarana jalan, jembatan dan perhubungan yang memadai.

b. Kurangnya sarana dan prasana pelayanan publik

Saat ini di Kota Cimahi pelayanan terhadap masyarakat masih tersebar di berbagai tempat, hal tersebut menjadi kendala bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang mudah, cepat, dan nyaman. Berdasarkan Peraturan KemenPAN RB RI No. 23 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik bahwa :

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun Anggaran 2017

2

- Untuk peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan diperlukan pengelolaan pelayanan publik terpadu dan terintegrasi seluruh jenis pelayanan Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD/Swasta pada satu tempat;
- Dalam upaya menyelenggarakan pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman perlu dilakukan pengintegrasian pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik.

Pemerintah Kota Cimahi telah menandatangani MoU dengan Kementerian PAN RB pada Bulan Maret 2019. Dalam rangka peningkatan Pelayanan Publik Kota Cimahi sebagai wujud komitmen Pemerintah Kota telah membangun Kantor/ Mal Pelayanan Publik (tahap I).

c. Pembangunan yang tidak berizin dan melanggar peraturan

Pembangunan yang tidak terkendali dan tanpa perizinan dan pemerintah kota telah membuat wajah kota menjadi semrawut dan melenceng dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi. Diperlukan pengawasan dan pengendalian mengenai izin lokasi untuk menyesuaikan kembali dengan rencana tata ruang Kota Cimahi. Pemerintah Kota Cimahi telah melaksanakan penindakan terhadap bangunan yang tidak memiliki izin maupun yang melakukan pembangunan menyalahi izin yang diberikan. Telah dilakukan pemasangan plang peringatan pelanggaran di enam lokasi berupa bangunan dan perumahan di Kota Cimahi.

d. Masih banyaknya aset Prasarana Sarana Utilitas perumahan dan permukiman yang belum diserahkan kepada Pemerintah Kota

Banyaknya pembangunan perumahan di Kota Cimahi menjadi satu potensi pendapatan untuk daerah. Selain itu juga terdapat potensi aset daerah yang ada di dalam perumahan tersebut berupa Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU). Berdasarkan Perda Kota Cimahi No. 10 Tahun 2017 tentang Penyediaan, Penyerahan Prasarana Sarana Utilitas Perumahan dan Permukiman Dari Pengembang Kepada Pemerintah Kota, pengembang wajib menyerahkan prasarana sarana utilitas kepada pemerintah kota. Pemerintah Daerah Kota Cimahi telah melakukan proses serah terima PSU sebanyak 4 perumahan dan akan dicatat dalam neraca aset daerah. Jumlah tersebut masih sedikit dibandingkan dengan perumahan dan permukiman yang diperkirakan berjumlah 98 perumahan dan permukiman, sehingga perlu dilakukan percepatan dalam proses serah terima, pencatatan dalam neraca aset daerah.

1.4. Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi

Dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), Pemerintah Daerah Kota Cimahi telah membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Nomor 207 Tahun 2016). Perangkat Daerah dibentuk dengan memperhatikan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.5. Jumlah Pegawai/ASN Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi

Pada saat ini Dinas PUPR Kota Cimahi didukung oleh pegawai berjumlah 89 orang, yang terdiri dari :

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 54 orang
2. Pegawai Tenaga Harian Lepas sebanyak 35 orang

Jumlah pegawai berdasarkan golongan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1

DAFTAR PEGAWAI DINAS PUPR BERDASARKAN PANGKAT/GOLONGAN TAHUN 2019

No	Golongan	A	B	C	D	Jumlah
1	IV	3	1	1	-	5
2	III	7	11	8	9	35
3	II	1	1	7	5	14
4	I	-	-	-	-	-
Jumlah						54

Tabel 1.2

DAFTAR PEGAWAI DINAS PUPR BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN TAHUN 2019

No	Pendidikan	PNS	Tenaga Harian Lepas	Jumlah
1	SD		24	24
2	SLTP	1	1	2
3	SLTA	13	6	19
4	DIPLOMA	8	1	9
5	S1	23	3	26
6	S2	9	-	9
7	S3	-	-	-
Jumlah		54	35	89

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	CAPAIAN KINERJA
1	Meningkatnya kemantapan jalan kota	Tingkat kemantapan jalan kota (%)	Kapasitas jalan sampai dengan tahun n-1 ditambah penambahan kapasitas jalan tahun n	93,50%
2	Meningkatkan kualitas dan kuantitas gedung pemerintah kota	Persentase gedung pemerintah memiliki sertifikat laik fungsi	Persentase bangunan sampai dengan tahun n-1 ditambah penambahan prosentase bangunan tahun n	1,02%
3	Meningkatnya kepatuhan terhadap rencana tata ruang	Persentase kesesuaian RTRW	$(\text{Luas kawasan yang didirkan sesuai RTRW} / \text{Luas seluruh kawasan}) \times 100\%$	60%

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melalui berbagai kegiatan tahunan.

Berikut adalah target pencapaian yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)/Rencana Strategis (Renstra) 2017 - 2022 untuk lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi pada tahun 2019 :

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kemandirian jalan kota	Panjang pembangunan jalan/kapasitas jalan (km)	0,85 km
		Panjang jalan kota jalan dalam kondisi mantap (km)	106,343 km
		Panjang drainase jalan (km)	172,47 km
		Panjang trotoar jalan (km)	45,91 km
		Panjang jembatan kota dalam kondisi mantap (m)	2661,50 m
		Jumlah ruas jalan yang di inspeksi	108 ruas
		Jumlah jembatan yang di inspeksi	28 ruas
2	Meningkatkan kualitas dan kuantitas gedung pemerintah kota	Jumlah bangunan gedung yang direhabilitasi	2 unit bangunan
		Jumlah tukang disertifikasikan	300 orang
		Jumlah peserta sosialisasi	300 orang
		Jumlah bangunan yang sertifikasi	2 unit bangunan
3	Meningkatnya kepatuhan terhadap rencana tata ruang	Jumlah dokumen kebijakan	2 dokumen
		Frekuensi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan ruang	12 bulan
		Jumlah pemantauan pelaksanaan (jin pemanfaatan ruang	50 berkas
		Dokumen audit tata ruang	1 dokumen

2.3. Program/Kegiatan dan Anggaran yang mendukung Perjanjian Kinerja

Selanjutnya kami sampaikan program dan anggaran yang akan dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi pada Perjanjian Kinerja Perubahan Kota Cimahi tahun 2019 berdasarkan Indikator Kinerja Utama Kota Cimahi, dengan Jumlah belanja langsung sebesar **Rp. 173.865.792.348,-** atau **57,75%** dari total SKPD pada Tahun 2019 sebesar **Rp. 100.406.700.652,-**

Dalam rangka mencapai target-target tersebut, telah dirancang rincian Program dan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi pada Tahun 2019 sebagai berikut :

NO :	PROGRAM :	ANGGARAN :
		Rp. 173.865.792.348
1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 2.457.395.530
2	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara	Rp. 90.200.000
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rp. 103.607.030
4	Program pembangunan jalan dan jembatan	Rp. 50.785.080.000
5	Program pemeliharaan jalan dan jembatan	Rp. 50.944.540.468
6	Program peningkatan kualitas konstruksi	Rp. 67.200.653.120
7	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Rp. 1.304.237.990
8	Program Perencanaan Tata Ruang	Rp. 980.078.210

BAB III

PENGUKURAN KINERJA

B A B III

PENGUKURAN KINERJA

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja merupakan jawaban perjanjian kinerja. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai program, kebijakan, sesaran, dan tujuan yang telah di tetapkan dalam mewujudkan visi, misi, dan strategi instansi pemerintah. Tabel 3.1. menjelaskan pengukuran kinerja yang menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi.

3.1. Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi Tahun 2019

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	Meningkatnya kemantapan jalan kota	Panjang pembangunan jalary/kapasitas jalan (km)	0,85 km	0,00 km	0,00%
		Panjang jalan kota jalan dalam kondisi mantap (km)	105,493 km	105,493 km	100%
		Panjang drainase jalan (km)	172,47 km	172,47 km	100%
		Panjang trotoar jalan (km)	45,91 km	45,91 km	100%
		Panjang jembatan kota dalam kondisi mantap (m)	2661,50 m	2661,50 m	100%
		Jumlah ruas jalan	108 ruas	108 ruas	100%

		yang di inspeksi			
		Jumlah jembatan yang di inspeksi	28 ruas	28 ruas	100%
2	Meningkatkan kualitas dan kuantitas gedung pemerintah kota	Jumlah bangunan gedung yang terbangun	3 unit bangunan	3 unit bangunan	100%
		Jumlah bangunan gedung yang direhabilitasi	2 unit bangunan	2 unit bangunan	100%
		Jumlah tukang disertifikatkan	300 orang	300 orang	100%
		Jumlah peserta sosialisasi	150 orang	150 orang	100%
		Jumlah bangunan yang sertifikasi	2 unit bangunan	0 unit bangunan	0,00%
3	Meningkatnya kepatuhan terhadap rencana tata ruang	Jumlah dokumen kebijakan	2 dokumen	2 dokumen	100%
		Frekuensi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan ruang	12 bulan	12 bulan	100%
		Jumlah pemantauan pelaksanaan ijin pemanfaatan ruang	50 berkas	46 berkas	92%
		Dokumen audit tata ruang	1 dokumen	1 dokumen	100%

3.2. Realisasi Capaian Kinerja dengan Target Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi Tahun 2018 dan 2019

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA		KETERANGAN
			2018	2019	
1	Meningkatnya kemantapan jalan kota	Panjang pembangunan jalan/kapasitas jalan (km)	93%	93,96%	
2	Meningkatkan kualitas dan kuantitas gedung pemerintah kota	Persentase gedung pemerintah yang memiliki sertifikat laik fungsi	0%	0%	Pada pertengahan bulan Mei 2019 mengalami perubahan sasaran strategis SKPD hasil pendampingan Kemengan.
3	Meningkatnya kepatuhan terhadap rencana rinci tata ruang	Persentase kesesuaian pembangunan terhadap kebijakan rencana tata ruang	60%	60%	

3.3. Realisasi capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Target Jangka Menengah (Renstra)

NO.	SASARAN STRATEGIS	NO.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2019	TARGET Renstra 2019	KET.
1	Meningkatnya kemantapan jalan	1.	Panjang pembangunan	93,96%	93,50%	

	kota		jalan/kapasitas jalan (km)			
2	Meningkatkan kualitas dan kuantitas gedung pemerintah kota	2.	Persentase gedung pemerintah yang memiliki sertifikat laik fungsi	0%	6,35%	
3	Meningkatnya kepatuhan terhadap rencana rinci tata ruang	3.	Persentase kesesuaian pembangunan terhadap kebijakan rencana tata ruang	60%	60%	

3.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta alternatif solusi.

FAKTOR PENYEBAB KEBERHASILAN	FAKTOR PENYEBAB KEGAGALAN	KETERANGAN
Bidang Tata Ruang : Pelibatan Kecamatan dan Kelurahan dalam Pengendalian Pemanfaatan ruang Adanya Keterlibatan Kementerian ATR/BPN dan Pemerintah Provinsi dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Terutama Kawasan Bandung Utara dan das Citarum Dilakukannya Audit Pemanfaatan Ruang Dilakukannya Sosialisasi Kepada Masyarakat dan Stake Holder lainya yang terkait Perencanaan,Pemanfaatan maupun Pengendalian Tata Ruang		

Bidang Bina Marga : • Dilakukannya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan • Adanya Pembangunan Jalan dan Jembatan	• Pembebasan Lahan • Anggaran yang Tidak Mencukupi • Kegiatan Pembangunan jalan	Sehubungan kegiatan Pembangunan jalan diberikan anggaran dari Bantuan Provinsi pada Tahun 2019 belum dapat dilaksanakan karena izin dari Kemenhub baru terbit pada tanggal 23 Desember 2019. Sebagai tindak lanjut kegiatan Pembangunan Jalan yaitu Pembangunan Underpass Dustira – Sriwijaya pada Tahun 2020 harus dilaksanakan dengan ditambah anggarannya semula 50 Miliar (2019) , menjadi 102 Miliar (2020)
Bidang Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi: • Memantau Progres Pekerjaan di Lapangan • Bertanggung jawab Atas Pekerjaan • Sosialisasi pekerjaan yang akan dilakukan	• Ketimpangan dalam melaksanakan tupoksi dan tidak meratanya beban tugas pada sumberdaya manusia yang ada, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan menjadi lama	

3.5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	SUMBER DAYA	KONDISI	PROGRAM	KEGIATAN
1.	Aparatur Sipil Negara (ASN) DPUPR Kota Cimahi	Struktural = 14 orang Fungsional Umum = 40 orang	1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1. Penyediaan alat tulis kantor 2. Penyediaan jasa komunikasi, listrik dan air 3. Penyediaan media massa, barang cetakan, dan penggandaan 4. Pengadaan dan pemeliharaan Kendaraan Dinas 5. Pengadaan dan pemeliharaan meubelair

				kantor 6. Pengadaan dan pemeliharaan Alat Kantor 7. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 8. Penataan Arsip Daerah 9. Penyediaan Jasa Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan 10. Pengadaan Seragam Pegawai 11. Penyediaan Makanan dan Minuman 12. Koordinasi dan Konsultasi Kedinasan 13. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
2.			II. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara	14. Pengembangan kapasitas sumber daya pegawai
3.			III. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	15. Penyusunan anggaran perangkat daerah 16. Penyusunan laporan keuangan 17. Penyusunan RENSTRA dan RENJA PD 18. Penyusunan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, LKIP dan LPPD PD
4.			IV. Program pembangunan jalan dan jembatan	19. Pembangunan jalan
5.			V. Program pemeliharaan jalan dan jembatan	20. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 21. Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 22. Inspeksi kondisi jalan 23. Inspeksi kondisi jembatan
6.			VI. Program peningkatan kualitas konstruksi	24. Rehabilitasi bangunan/gedung 25. Pembangunan bangunan/gedung 26. Pemberdayaan pengguna jasa konstruksi 27. Pengawasan dan pengendalian bangunan
7.			VII. Program Pengendalian	28. Pengawasan pemanfaatan ruang

			Pemanfaatan Ruang	29. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan tata ruang
			VIII. Program Perencanaan Tata Ruang	30. Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang

3.6. Analisis Program atau Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

PROGRAM ATAU KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN	PROGRAM ATAU KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN MENCAPAI KEGAGALAN KEBERHASILAN	KETERANGAN
Bidang Tata Ruang : 1. Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang 2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Tata Ruang 3. Penyusunan Kebijakan tentang Penyusunan rencana Tata Ruang	-	-
Bidang Bina Marga : 1. Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan 2. Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan 3. Kegiatan Inspeksi kondisi Jalan 4. Kegiatan Inspeksi kondisi Jembatan	Kegiatan Pembangunan jalan	Kegiatan Pembangunan jalan dengan anggaran dari Bantuan Provinsi pada Tahun 2019 belum dapat dilaksanakan karena izin dari Kemenhub baru terbit pada tanggal 23 Desember 2019. Maka sebagai tindak lanjut kegiatan Pembangunan Jalan pada Tahun 2020 dilaksanakan

		Pembangunan Jalan <i>Underpass</i> Dustira – Sriwijaya . Dengan tambahan anggaran semula 50 Miliar menjadi 102 Miliar.
Bidang Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi: 1. Kegiatan Rehabilitasi bangunan/gedung 2. Kegiatan Pembangunan bangunan/gedung 3. Kegiatan Pemberdayaan pengguna jasa konstruksi 4. Kegiatan Pengawasan dan pengendalian bangunan		

B. REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran yang dialokasikan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi pada TA 2019 yaitu sebesar **Rp. 173.865.792.348,-** realisasi keuangan pada akhir tahun sebesar **Rp. 100.406.700.652,-** atau **57,75%** sedangkan sisa anggaran sebesar **Rp. 73.459.091.696,-** atau **42,25%**, sisa anggaran tersebut terdiri dari nilai retensi, sisa lelang, dan efisiensi kegiatan. Perlu diketahui bahwa di Bidang Bina Marga mendapat Bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Barat pada Program Pembangunan Jalan dan Jembatan khususnya, untuk pembangunan *Underpass/Fly over* Dustira – Sriwijaya belum dapat dilaksanakan karena belum mendapat izin dari Kemenhub. Dan baru terbit izin dari Kemenhub pada tanggal 23 Desember 2019. Sehingga nilai penyerapan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi pada TA 2019 sebenarnya secara persentase lebih dari angka tersebut diatas.

Sisa anggaran yang tidak terealisasi terdapat di beberapa kegiatan antara lain pada kegiatan *Pengadaan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas* yang tidak terealisasi adalah belanja service alat berat tidak digunakan karena kondisi masih layak digunakan, kemudian di kegiatan *Pembangunan Bangunan/Gedung* yaitu pekerjaan Penataan Pagar

tidak jadi dilaksanakan karena ketidaksesuaian kode rekening lalu di kegiatan *Pengawasan dan Pengendalian Bangunan* untuk Pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) masih Menunggu dibuatnya SK Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) dan di kegiatan *Pembangunan Jalan* yang tidak terealisasi adalah Pembangunan Underpass/Fly Over Sriwijaya belum dapat dilaksanakan sebelum ijin dari Kemenhub dikarenakan ijin tersebut terbit pada tanggal 23 Desember 2019.

Berikut dilampirkan laporan kegiatan, penyerapan anggaran beserta alasan tidak dapat direalisasikan beberapa pekerjaan secara rinci pada masing-masing kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi TA 2019.

C. Cross Cutting Program

LINTAS SKPD			LINTAS INSTANSI VERTIKAL		
No	BANTEK	KOORDINASI	No	BANTEK	KOORDINASI
1	DINKES	DISHUB	1	TNI	BPN
2	RSUD	DPMPSTP	2	POLRES	BPS
3	DISDIK	SATPOL PP	3	KEJAKSAAN	
4	DISBUDPARPORA	BAGIAN PENGADAAN BARANG JASA	4	BPN	
5	INSPEKTORAT	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	5	BPS	
6	KECAMATAN	DPKP	6	TTUC	
7	KELURAHAN	DLH			

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi ini disusun berdasarkan hasil analisa kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2019 dan didasarkan pada analisis obyektif terhadap data, fakta dan informasi yang sebenarnya.

Dengan disusunnya laporan ini diharapkan menjadi bahan koreksi dan pedoman bagi pelaksanaan upaya pencapaian Kinerja Dinas untuk menunjang Visi dan Misi Kota Cimahi pada tahun-tahun mendatang. Sehingga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi diharapkan dapat menjadi salah satu Dinas andalan Pemerintah Kota Cimahi.

Demikian pula dengan hambatan dan kendala pelaksanaan tugas dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran. Permasalahan yang dihadapi pada Tahun Anggaran 2019 ini pada umumnya lebih pada permasalahan internal yang menyangkut persiapan pelaksanaan kegiatan dan koordinasi antar Dinas/Instansi/Lembaga di daerah maupun di pusat, serta permasalahan baru yang muncul bersamaan pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan. Hal ini menjadi kendala yang umum ditemukan pada sistem pemerintahan baru seperti halnya Pemerintah Kota Cimahi.

Permasalahan dan kendala eksternal yang menyangkut kesadaran partisipasi masyarakat yang dirasakan masih kurang dalam menjaga dan memelihara sarana dan prasarana pemukiman/perkotaan tetap menjadi permasalahan yang harus terus diupayakan peningkatannya.

Permasalahan tersebut diatas kiranya dapat diatasi melalui peningkatan koordinasi, hubungan dan kerjasama yang baik antar Dinas, Instansi dan Lembaga khususnya di Kota Cimahi. Sedangkan untuk peningkatan partisipasi masyarakat perlu terus ditingkatkannya sosialisasi dan proses pemberdayaan masyarakat yang merupakan tugas dan tanggung jawab seluruh stake holder di Kota Cimahi.

Penyusunan laporan ini masih jauh dari sempurna dan bersifat terbuka untuk diadakan koreksi dan penyesuaian serta perbaikan di masa datang sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Namun demikian, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan yang dimaksudkan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan sebagai media pertanggungjawaban publik, diharapkan menjadi sarana bagi upaya perwujudan *Clean Government* dan *Good Governance*.

BAB IV

PENUTUP

LAMPIRAN - LAMPIRAN

